

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MUHAMMAD TAUHID, S.AP
NIP : 19730626 199308 1 001
PANGKAT / GOL : Penata (III/c)
JABATAN : Kepala Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan
Pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Triwulan : IV Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas dan fungsi Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

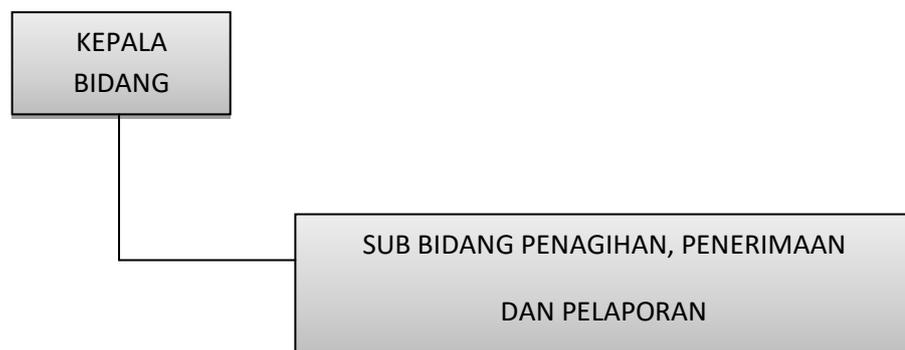
Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi penagihan, penerimaan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk melaksanakan tugas di atas Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan;

- b. melakukan penagihan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. melaksanakan proses usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. melakukan pelayanan proses permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. melaksanakan penatausahaan penerimaan, piutang, restitusi dan estimasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan potensi;
- f. melakukan bimbingan, sosialisasi dan himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta memerikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan pihak bank dan kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan kinerja menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya : kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar proses yang ditetapkan. Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah output suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien dan publik atau masyarakat

Khusus dalam laporan ini yang dibahas adalah akuntabilitas kinerja individu yang menggambarkan kinerja jabatan Kepala Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan IV Tahun 2019 yang terdiri dari perjanjian kinerja, capaian kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja yang akan diuraikan dihalaman berikut ini

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN Kinerja : Triwulan : IV

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Terlaksananya pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan	Laporan	3			
2	Tersedianya Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi)	Data realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan	Kali	1			
3	Terlaksananya penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang diverifikasi	Dokumen	3			

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Terlaksananya pengelolaan penerimaan PBB-P2	Realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan	Laporan	3	3	100					
2	Tersedianya Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi)	Data realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan	Kali	1	1	100					
3	Terlaksananya penatausahaan piutang PBB-P2	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang diverifikasi	Dokumen	3	3	100					
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019						100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan dari 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Terlaksananya pengelolaan penerimaan PBB-P2, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja:

- Realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan, tercapai (100%)

2. Sasaran : Tersedianya Data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi), capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Data realisasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan, tercapai (100%)

3. Sasaran : Terlaksananya penatausahaan piutang PBB-P2, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja:

- Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang diverifikasi, tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk memaksimalkan sasaran dan indikator yang sudah tercapai di atas adalah SOP (Standart Operating Procedure) Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan dengan pihak Kecamatan, Petugas Penagih dan Pihak Bank (Kas Daerah) lebih ditingkatkan koordinasinya.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. SOP pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB belum berjalan dengan baik.
2. Realisasi di lapangan belum maksimal.

C. Saran/ masukan

1. Mendorong keterlibatan pimpinan SKPD dalam menggerakkan SOP pada masing-masing Bidang di Badan Keuangan Daerah;
2. Agar pelaksanaan SOP bisa dilaksanakan, dipatuhi dan dijalankan.

Tanggal, Desember 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB,



ANDRE BUDIMAN, SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19721005 200604 1 027

Kepala Sub Bidang Penagihan,
Penerimaan dan Pelaporan,



MUHAMMAD TAUHID, S.AP

Penata (III/c)

NIP. 19730626 199308 1 001

